

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

dengan baik.

NOMOR SOP	KWL.KHH.XI.1a.3.1						
TANGGAL PEMBUATAN	20 Desember 2019						
TANGGAL REVISI							
TANGGAL EFEKTIF	22 Januari 2020						
DISAHKAN OLEH	22 Januari 2020  REGIONAL PROGRAMMENTO SARIWANTO SARIWAN						
	DELAWANAN DENGUAYAN DOCUMEN ANGGARAN						

KANTOR WILAYAH  DIVISI ADMINISTRASI		BAMEA RANTAM SARIWANTO ON THE STORY OF THE S		
	NAMA SOP:	PELAKSANAAN PENGUSULAN POSTUR ANGGARAN		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer			
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik			
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengendalian dan Evaluasi			
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga	4. Mengetahui dan memahami aplikasi RKA-K/L			
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
<ol> <li>Peraturan Menteri Keuagan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran</li> <li>Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-05.PR.01.04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran d Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Tahun Berjalan</li> </ol>				
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	i			
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKA	PAN:		
1. SOP Analisa Kebutuhan Anggaran	1. Komputer/Printer/Scanne	r		
	2. Jaringan Internet			
	3. Jaringan Telekomunikasi			
	4. Disposisi			
ERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAR	TARAN:		
pabila pengusulan postur anggaran tidak dilaksanakan maka perencanaan program dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah tidak dapat tersusun engan baik.	Disimpan sebagai data elektr	onik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali		

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUSULAN POSTUR ANGGARAN

		PELAKSANA								
NO	KEGIATAN	KAKANWIL	KADIVMIN	KABAG PROGRAM & HUMAS	KASUBBAG PP	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
	Memerintahkan Kadivmin untuk mempersiapkan data-data usulan Postur Anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah	MULAI					surat Sekretaris Jenderal/Kepala Biro Perencanaan	15 menit	disposisi secara elektronik	
	Memerintahkan Kabag Program & Humas untuk mempersiapkan data-data usulan Postur Anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah		<u> </u>				disposisi secara elektronik	15 menit	disposisi secara elektronik	
	Memberikan disposisi kepada Kasubbag PP untuk mempersiapkan data-data usulan Postur dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah						disposisi secara elektronik	15 menit	disposisi secara elektronik	
	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk mempersiapkan data-data usulan Postur Anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah				<b>*</b>		disposisi secara elektronik	30 menit	arahan	
	Mengumpulkan data/bahan laporan, menyusun laporan dalam bentuk data usulan Postur Anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah untuk dilaporkan kepada atasan				T	<b>→</b>	arahan	1 hari	laporan data usulan postur anggaran	
	Mengoreksi hasil akhir laporan data-data usulan Postur Anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah dan mengirimkannya kepada Kabag Program dan Humas			T			konsep surat	30 menit	konsep surat dalam sisumaker	
	Mengoreksi hasil akhir laporan usulan Postur Anggaran seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah dan mengirimkannya kepada Kadivmin		T	<b>→</b>	Y		konsep surat dalam sisumaker	30 menit	konsep surat dalam sisumaker	
	Mengoreksi hasil akhir laporan usulan Postur Anggaran seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah dan mengirimkannya kepada Kakanwil		<b>*</b>	Y			konsep surat dalam sisumaker	30 menit	konsep surat dalam sisumaker	
	Menyetujui hasil akhir laporan usulan Postur Anggaran dan memerintahkan untuk dilakukan pengiriman hasil usulan Postur Anggaran seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah via Email dan Sisumaker	SELESAI	Y				konsep surat dalam sisumaker	30 menit	surat yang telah di tanda tangani	selanjutnya surat di beri nomor dan dikirim ke Sekretariat Jenderal